Partisipasi Masyarakat Nagari Sikabu Kecamatan LubukAlung dalam Pembebasan Lahan Pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat

Fathur Rizqi

Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Andalas

Email: fathurrizqi4114@gmail.com

Abstract: West Sumatra, which in the Minangkabau tradition, land is a high heirloom property that must be protected and cannot be sold or misused. This study aims to describe the participation of local communities in land acquisition for the construction of the West Sumatra Main Stadium. The theory used in this research is social capital theory from Robert M.Z Lawang which explains trust, social networks, and norms in building community participation. This research uses qualitative methods and descriptive research type. Data collection was carried out by observation and interviews. The belief that was found was the existence of tribal ties between landowners, secondly because of shared experience in solving problems, third because of the role of community leaders, in this case the customary *mamak* with the title *Datuak*, fourth because of the certainty of compensation prices that did not harm the community or government, fifth because there is a guarantee of honesty and openness from related parties including community leaders who will protect the rights of the Sikabu community and do not allow additional land by parties who are not responsible for their personal interests. Networks can create trust between the characters involved. The norms found in the Sikabu community are the custom of *salingka nagari* and the function of the *tigo sajarangan stove* which can play its role well.

Keywords: Social Capital, Participation, Land acquisition process

A. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh suatu masyarakat atau bangsa. Pembangunan diharapkan dapat menunjang perubahan pola hidup masyarakat menuju ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Beberapa ahli telah memberikan pandangannya tentang pembangunan, seperti Siagian (1994) yang mengatakan bahwa pembangunan ialah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Kemudian Deddy T. Tikson (2005) memberikan pandangan bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Sedangkan dalam pengertian ekonomi murni, pembangunan adalah suatu proses usaha yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Sukirno, 1995:13). Pembangunan tidak hanya

berbentuk fisik, namun juga pembangunan non fisik. Kedua jenis pembangunan tersebut hendaknya saling berkesinambungan, dimana tanpa adanya pembangunan non fisik, maka pembangunan fisik pun akan kurang memberikan dampak yang berarti bagi perekonomian masyarakat sekitar.

Pembangunan fisik tidaklah dilaksanakan dalam satu proses saja, tapi setiap pembangunan fisik terdapat tiga tahapan yang harus dilalui. Tahapan yang terdapat di dalam pembangunan fisik di antaranya adalah tahap pra konstruksi, tahap konstruksi, dan terakhir adalah tahap pasca konstruksi. Pada penelitian ini, peneliti mencoba meneliti pada tahap pra konstruksi. Tahap pra konstruksi dikenal dengan istilah pembebasan lahan. Dalam pengertian secara umum, pembebasan lahan merupakan kegiatan membeli tanah dari penduduk dalam jumlah yang cukup luas oleh Perseroan Terbatas (PT) yang sudah memiliki Ijin Lokasi (IL). Pada umumnya pembelian dengan pola seperti ini dilakukan dengan cara pembayaran tunai kepada masing-masing penduduk pemilik lahan. Namun, proses pembebasan lahan dalam pembangunan fisik tak melulu mendapat jalan yang mulus, ada banyak kendala yang dihadapi oleh pihak terkait dalam melobi masyarakat agar bersedia menjual lahan mereka untuk keperluan pembangunan tersebut.

Kendala dalam proses pembebasan lahan sudah marak terjadi di Indonesia, permasalahan pembebasan lahan seakan menjadi hal biasa di Indonesia, dimana setiap ada proyek pembangunan yang membutuhkan lahan akan tersiar berita di media baik itu televisi, media sosial ataupun media cetak tentang kendala pembebasan lahan. Terkait kendala pembebasan lahan juga pernah disampaikan oleh Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo, "Masalah tanah ini masih menjadi persoalan yang besar dan dapat menghambat pembangunan infrastruktur. Untuk itu perlu ada arahan dan kesepakatan agar para hakim, baik pengadilan negeri maupun tinggi cukup *confidence* untuk menyelesaikan masalah konsinyasi sesuai dengan peraturan yang ada," ujar Wahyu dalam keterangan resminya, Selasa (24/4). Kendala pembebasan lahan terkadang berujung penggusuran atau pembongkaran secara paksa bangunan-bangunan seperti rumah dan lapak dagang masyarakat.

Salah satu contoh kendala pembebasan lahan juga terjadi di Kabupaten Padang Pariaman. Pembebasan lahan di Padang Pariaman yang sampai saat ini belum kunjung usai adalah Masalah pembebasan lahan proyek pembangunan jalan Tol Trans Sumatera. Proyek pembangunan jalan tol sepanjang 2.818 Kilometer yang menghubungkan kota-kota di Pulau Sumatera mulai dari Lampung hingga Aceh dengan perkiraan anggaran sebesar 150 Triliun Rupiah telah diusung sejak tahun 2012 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tahun 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan peraturan presiden nomor 100 tahun 2014 tentang percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera tanggal 17 September Tahun 2014. Pada 23 Agustus 2016, Menteri Pembangunan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) mengeluarkan surat penugasan kepada PT. Hutama Karya selaku salah satu pengembang yang menggarap proyek pembangunan jalan tol Trans Sumatera untuk membangun tiga ruas tambahan, yaitu Banda Aceh-Medan, Tebing Tinggi-Parapat, dan Padang-Pekanbaru.

Pembangunan tol ruas Padang-Pekanbaru yang diperkirakan sepanjang 240 Kilometer terkendala pembebasan lahan di Kabupaten Padang Pariaman. Sebagaimana dikutip dari GoSumbar.com (Kamis 08 November 2018),

pembangunan tol ruas Padang-Pekanbaru yang harusnya dimulai dari Sumatera Barat akhirnya dimulai pembangunannya dari Riau karena ada kendala pembebasan lahan di Padang Pariaman. Masyarakat Padang Pariaman menetapkan harga tanah dengan kisaran Rp. 600 ribu hingga Rp. 2 juta per meter persegi. Namun, harga tersebut tidak disanggupi oleh tim appraisal, karena pihak pemerintah dan pengembang menilai harga tanah yang akan dijadikan lokasi pembangunantoltrans Sumatera di Padang Pariaman tidak sampai setinggi itu.

Kendala pembebasan lahan di Padang Pariaman bukan tanpa alasan, bagi masyarakat Padang Pariaman yang umumnya adalah masyarakat Minangkabau, tanah bukan hanya milik pribadi, tetapi merupakan milik kelompok atau biasa dikenal milik kaum. Hal ini mendorong adanya kegiatan bagi hasil dari penjualan tanah sebagai hak dari masing-masing anggota kaum. Dalam sistem adat masyarakat Minangkabau, tanah merupakan harta pusaka yang memiliki kedudukan tinggi dalam kaum. Sebagaimana yang disampaikan oleh A.A. Navis (1984:150) bahwa masyarakat Minangkabau adalah masyarakat agraris, dimana tanah dipandang mempunyai posisi yang sangat penting. Dalam falsafah masyarakat Minangkabau, tanah merupakan lambang dari martabat suatu kaum. Kaum atau kelompok masyarakat yang tidak memiliki tanah akan dipandang sebagai orang yang kurang dan sering dianggap sebagai orang pendatang (malakok) yang kurang jelas asal usulnya. Tanah merupakan tempat lahir, tempat hidup dan juga tempat mati. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa setiap orang yang hidup harus memiliki sebuah rumah tempat anak cucu lahir dan juga tempat mereka mencari penghidupan, bahkan ketika seseorang meninggal mereka jugamasih membutuhkan tanah tempat mereka dikuburkan.

Pentingnya peranan tanah dalam kehidupan masyarakat Minangkabau memunculkan semacam hak dan kewajiban bagi penguasaan tanah yang bersangkutan. Hal ini yang juga berlaku pada masyarakat Kabupaten Padang Pariaman, khususnya Nagari Sikabu, sehingga diperlukan keterlibatan langsung dari masyarakat dalam setiap pembangunan yang diadakan pemerintah yang melibatkan tanah ulayat masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan memang sangat diperlukan. Terutama pada tahap pembebasan lahan. Kekuasaan suatu kaum terhadap tanah di Minangkabau, khususnya Nagari Sikabu, Kabupaten PadangPariaman.

Sikabu merupakan satu dari sembilan nagari hasil pengembangan Nagari Lubuk Alung. Nagari Sikabu terletak di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Nagari Sikabu digadang-gadang akan menjadi Nagari Mandiri Pangan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang juga bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sehingga hal ini membuat lahan menjadi hal penting bagi masyarakat Sikabu. Permasalahan lahan yang pernah terjadi di Nagari Sikabu adalah tentang proyek pembangunan salah satu ruas tol trans Sumatera yang tak mendapat titik terang tentang harga yang disepakati yang pada akhirnya dirubah menjadi jalan lingkar. Pembangunan salah satu ruas tol yang melewati Nagari Sikabu mendapat penolakan dari masyarakat karena dianggap akan mematikan perekonomian masyarakat. Hal ini dikarenakan jalan tol yang merupakan jalur cepat dan memiliki pembatas yang tinggi sehingga sangat kecil kemungkinan berkembangnya perekonomian di Sikabu. Selain itu juga ada sebuah kolam renang yang secara geografis terletak atau dibangun di Nagari Batu Busuak,

namun sertifikat atau izin pembangunan kolam renang tersebut ada atau terdaftar di Nagari Sikabu dengan alasan bahwa tanah lokasi pembangunan kolam renang itu adalah tanah ulayat milik masyarakat Sikabu. permasalahan ini masih menjadi sengketa dan sering dipermasalahkan oleh masyarakat Nagari Sikabu dan masyarakat Nagari Batu Busuak.

Pentingnya tanah bagi masyarakat Sikabu sehingga tidak mudah bagi mereka untuk melepas tanahnya bukan hanya tentang hak kepemilikan tanah dalam adat Minangkabau, namun juga tanah merupakan salah satu sumber pendapatan utama masyarakat Sikabu. Hal ini sejalan dengan jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani, dimana data dihimpun dari kantor wali nagari tahun 2017 yang mana jumlah penduduk bermatapencaharian sebagai petani adalah tertinggi di Nagari Sikabu dengan jumlah 150 orang. Tanah di Nagari Sikabu juga masuk dalam kategori subur, hal ini karena memiliki sumber pengairan langsung dari aliran sungai/mata air tapian puti sehingga ada berbagai jenis tanaman yang tumbuh dan berkembang maupun dikembangkan di Nagari Sikabu. Seperti, jagung, coklat, durian, buah naga, sawah, kebun karet, tanaman pohon jati, kebun pisang, dan lainnya.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan pertanyaan penelitian, yakni: "bagaimana partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat?"

Tinjauan Pustaka

a. Konsep Partisipasi Pembangunan

Partisipasi adalah suatu aktifitas untuk membangkitkan perasaan keikutsertaan dalam kegiatan organisasi, ditinjau dari segi etimologis partisipasi berarti ikut serta. Davis (1962) mengatakan "*participation is define as and emotional involvement of a group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them*". Maksudnya, partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental dan emosional seorang individu dalam situasi kelompok tertentu yang mendorong untuk mendukung atau menunjang tercapainya tujuan-tujuan kelompok serta ikut bertanggung jawab terhadapnya.

Konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah mulai dikenalkan oleh pemerintah sejak awal tahun 1980-an melalui istilah pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk dapat berpartisipasi dalam membangun serta menjaga lingkungan dimana mereka berada.

b. Konsep Pembebasan Lahan

Definisi pembebasan lahan adalah kegiatan membeli tanah dari penduduk dalam jumlah yang cukup luas oleh Perseroan Terbatas (PT) yang sudah memiliki Ijin Lokasi (IL). Pada umumnya pembelian dengan pola seperti ini dilakukan dengan cara pembayaran tunai kepada masing-masing penduduk pemilik lahan tersebut.

c. Masyarakat Lokal

Masyarakat adalah sekumpulan individu atau manusia yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Dalam kasus ini masyarakat lokalnya ialah yang bertempat tinggal di Nagari Sikabu, Kabupaten Padang Pariaman. Sebagian besar masyarakat Sikabu bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, dan pegawai negeri sipil.

d. Konsep Modal Sosial

Penelitian ini mengungkapkan bagaimana partisipasi masyarakat Nagari Sikabu, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman dalam proses pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur atau pembangunan sarana publik yang dalam hal ini adalah Stadion Utama Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan konsep kapital sosial yang melihat adanya potensi yang dimiliki oleh masyarakat Sikabu dalam mensukseskan proses pembebasan lahan pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat.

Menurut Robert M. Z. Lawang, seorang sosiolog yang serius membahas konsep kapital sosial, kapital sosial menurutnya merupakan semua kekuatan sosial dan komunitas yang dikonstruksikan oleh individu atau kelompok yang mengacu pada struktur sosial yang menurut penilaian mereka dapat mencapai tujuan individual dan/atau kelompok secara efisien dan efektif dengan kapital- kapital lainnya (Lawang: 2004: 217). Robert M Z Lawang memaparkan konsep- konsep dari kapital sosial terdiri dari kepercayaan, norma dan jaringan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kepercayaan

Ada tiga hal terkait Inti dari kepercayaan manusia yang saling berkaitan, di antaranya adalah hubungan sosial antara dua orang atau lebih. Termasuk institusi yang dalam pengertian ini diwakili oleh orang-orang yang percaya pada institusi tertentu untuk kepentingannya, juga adanya kepercayaan kepada individu lain di dalam kelompok masyarakat yang tercipta dari pengalaman bersama sehingga mereka berani berbuat dan bertindak. Berger dalam (Lawang, 2004: 57) juga menjelaskan bahwa kepercayaan didasarkan pada kenyataan bahwa manusia tidak stabil (*built-in instability*), sehingga manusia membutuhkan kerjasama dalam memecahkan masalah yang dihadapi bersama.

Peran tokoh masyarakat atau pemimpin di dalam suatu kelompok haruslah memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan bersama, sebagaimana yang disampaikan oleh Kartini Kartono tentang pemimpin, bahwa terdapat kecakapan yang dimiliki oleh seseorang dalam bidang-bidang tertentu sehingga mampu mempengaruhi individu-individu lain melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi tercapainya tujuan yang diinginkan, (Kartini Kartono, 1994:33). Kepercayaan yang telah tertanam di dalam masyarakat atau kelompok dapat meningkatkan kesadaran masyarakat atau anggota kelompok untuk berpartisipasi dalam mensukseskan kebijakan atau keputusan yang diambil oleh pemimpin di kelompok tersebut.

2) Jaringan

Jaringan dan fungsinya terhadap pencapaian sesuatu tidak lepas dari kepercayaan. Menurut Lawang konsep jaringan yang digunakan dalam teori kapital sosial, memiliki arti yang kurang lebih sebagai berikut:

- Ada ikatan antar simpul (orang atau kelompok) yang dihubungkan dengan media (hubungan sosial). Hubungan sosial ini diikat dengan kepercayaan, boleh dalam bentuk stratagik, boleh juga dalam bentuk moralistik. Kepercayaan itu dipertahankan oleh norma yang mengikat kedua belah pihak.
- Ada kerja simpul (orang atau kelompok) yang melalui media hubungan sosial menjadi suatu kerja sama, bukan kerjabersama-sama. Kepercayaan simbolik bilateral dan kepercayaan impersonal masuk dalam kategori ini.
- Seperti halnya sebuah jaring (yang tidak putus) kerja yang terjalin antar kedua

simpul itu pasti kuat menahan beban bersama dan malah dapat menangkap ikan lebihbanyak.

- Dalam kerja jaring itu ada ikatan (simpul) yang tidak dapat berdiri sendiri. Ketika satu simpul putus, maka keseluruhan jaringan itu tidak bisa berfungsi lagi. Semua simpul menjadi satu kesatuan dan ikatan yangkuat.
 - Media (benang atau kawat) dan simpul tidak dapat dipisahkan, atau antara orang-orang dan hubungannya tidak dapat dipisahkan.
 - Ikatan atau pengikat (simpul) dalam kapital sosial adalah norma yang mengatur dan menjaga bagaimana ikatan dan medianya itu dipelihara dandipertahankan.
- 3) Norma

Norma tidak dapat dipisahkan dengan jaringan atau kepercayaan. Kalau struktur jaringan itu terbentuk karena pertukaran sosial yang terjadi antara dua orang, sifat norma muncul dari pertukaran yang salingmenguntungkan.

- Norma bersifat resiprokal, artinya isi norma menyangkal hak dan kewajiban kedua belah pihak yang dapat menjamin keuntungan yang diperoleh dari suatu kegiatan tertentu.
- Jaringan yang terbina lama dan menjamin keuntungan kedua belah pihak secara merata, akan memunculkan norma keadilan. Setiap pada yang melanggar prinsip keadilan akan dikenakan sanksi yang keraspula.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan mengacu pada perspektif teoritis yang dipakai oleh para peneliti dalam melakukan penelitian dan metode penelitian merupakan cara yang dipakai oleh para peneliti untuk memecahkan masalah dan mencari jawaban atas masalah-masalah penelitiannya, Afrizal (2014 : 11). Penelitian ini mencoba mendeskripsikan partisipasi masyarakat Sikabu terhadap pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat pada tahap pra konstruksi pembebasan lahan menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma Interpretatif.

Informan Penelitian

Peneliti menggunakan teknik pemilihan informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* (pemilihan informan secara sengaja) yaitu mewawancarai informan dengan sengaja oleh peneliti berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atau karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan penelitian dan keadaan mereka diketahui oleh peneliti.

Data Yang Diambil

Data di dalam penelitian ini dibagi ke dalam dua bagian, yaitu data primer dan datasekunder.

- 1) Data primer merupakan data atau informasi yang didapat langsung dari informan penelitian di lapangan. Data primer didapat dengan menggunakan metode wawancara mendalam dan observasi (memastikan dan menyesuaikan kebenaran dari apa yang telah diwawancara). Data primer yang diambil adalah data yang menyangkut modal sosial dalamproses pembebasan lahan pembangunan Stadion Utama SumateraBarat.
- 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari institusi, lembaga dan media yang dapat mendukung dan relevan dengan penulis ini serta dapat diperoleh

dari studi kepustakaan, dokumentasi, data statistik, foto-foto, literatur-literatur hasil penelitian dan artikel yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Observasi

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada kondisi terkini pada pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat di Nagari Sikabu dengan menggunakan pancaindra, dengan menggunakan metode observasi peneliti dapat melihat, mendengar dan merasakan apa yang sebenarnya terjadi. Metode observasi bertujuan untuk mendapatkan data yang dapat menjelaskan atau menjawab penelitian. Pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek sehingga memungkinkan pula peneliti menjadi sumber data dan pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama, baik daripihaknya maupun dari pihak subjek (Moleong 2006;175). Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana dinamika kehidupan masyarakat Sikabu dan melihat langsung proses pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat.

2) Wawancara Mendalam

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu (Mulyana, 2010). Pada penelitian ini, wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam (*indepth interview*), yaitu proses wawancara secara informal antara pewawancara dengan informan yang dilakukan secara berulang-ulang, dalam proses wawancara informan diberikan kebebasan untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya. Alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah smartphone android, pena, kertas dan pancaindera peneliti sendiri.

Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu dalam masyarakat yang memiliki kriteria sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, yaitu masyarakat yang terlibat dalam proses pembebasan lahan untuk pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung, mulai dari pengumpulan data sampai pada tahap penulisan data atau merupakan suatu proses penyusunan data supaya data mudah dibaca dan ditafsirkan oleh peneliti. Menurut Miles dan Huberman data kualitatif adalah mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Reduksi data yaitu kegiatan pemilihan data penting dan tidak penting dari data yang telah terkumpul. Penyajian data yaitu penyajian informasi yang tersusun. Kesimpulan data yaitu sebagai tafsiran atau interpretasi terhadap data yang telah disajikan (Afrizal, 2014;174).

3) Definisi Operasional Konsep

1) Partisipasi pembangunan

Adalah hak dan kewajiban seorang warga negara untuk memberikan kontribusinya pada pencapaian tujuan kelompok, sehingga mereka diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif dan kreatifitasnya. Seperti halnya di Nagari Sikabu, pada pembangunan yang sedang dijalankan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Nagari Sikabu dapat kita lihat terdapat partisipasi terhadap pembangunan yang ditunjukkan oleh masyarakat Sikabu, seperti halnya dalam proses pembebasan lahan, dimana masyarakat pemilik tanah terlibat dalam pembangunan dengan bersedia melepas tanahnya untuk dijadikan lokasi atau tempat diselenggarakannya pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat

2) Masyarakat lokal

Merupakan sekumpulan atau sekelompok manusia yang hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga menghasilkan sebuah kebudayaan di dalam suatu daerah yang sama. Hal ini di antaranya adalah masyarakat yang berada di daerah atau lokasi penelitian terkait, seperti halnya masyarakat Nagari Sikabu, dimana mereka telah hidup bersama dalam jangka waktu yang lama sehingga terciptanya norma dan aturan yang berlaku oleh masyarakat setempat atau dalam istilah Minang disebut dengan adat saligka nagari.

3) Pembebasan lahan

Pembebasan lahan adalah kegiatan membeli tanah kepada penduduk dalam jumlah besar oleh Perseroan Terbatas (PT) atau pemerintah yang sudah memiliki Ijin Lokasi (IL). Biasanya pembelian dengan pola seperti ini dilakukan dengan cara pembayaran tunai kepada masing-masing penduduk pemilik tanah. Seperti halnya proses pembebasan lahan di Nagari Sikabu, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, dimana pemerintah melakukan pembebasan lahan milik masyarakat Nagari Sikabu dan Nagari Lubuk Alung untuk pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat

4) Stadion

Stadion adalah sebuah bangunan yang umumnya digunakan untuk menyelenggarakan acara olahraga, dimana di dalamnya terdapat lapangan atau pentas yang dikelilingi tempat berdiri atau duduk bagi penonton. Stadion umumnya digunakan untuk merujuk kepada bangunan yang menyelenggarakan kegiatan luar ruangan (*outdoor*), sementara bagi kegiatan dalam ruangan bangunannya disebut gelanggang. Hal ini sebagaimana yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Nagari Sikabu yaitu pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat yang tidak hanya sebagai sarana pertandingan sepakbola saja, tapi juga untuk cabang olahraga lain seperti lintasan atletik, olahraga bela diri, bulu tangkis, dan berbagai arena olahraga yang dipertandingkan dalam Pekan Olahraga Nasional.

C. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Informan dari penelitian ini keseluruhan berjumlah 8 orang yang terdiri dari empat orang merupakan perwakilan dari masing-masing kaum pemilik tanah, satu orang niniak mamak Nagari Sikabu, kemudian satu orang perwakilan tim yang

ditunjuk untuk sosialisasi ke masyarakat yang dalam hal ini bernama tim sebelas, satu orang merupakan masyarakat Nagari Sikabu bukan pemilik tanah namun terlibat dalam rapat kecil maupun besar terkait pembebasan lahan pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat yang dalam hal ini adalah salah seorang pemuda Sikabu, serta satu orang staf wali nagari sebagai perwakilan Lembaga pemerintah daerah Nagari Sikabu, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman.

1. Pembebasan Lahan Pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat

Proses pembebasan lahan untuk pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat di Nagari Sikabu berlangsung pada tahun 2014. Kegiatan ini diawali dengan diadakannya sosialisasi oleh pihak pemerintah daerah kepada tokoh masyarakat dan petinggi Nagari Sikabu. Pada proses ini pihak pemerintah meminta bantuan dan kerjasama dari para tokoh masyarakat Nagari Sikabu untuk dapat mensosialisasikan dan meyakinkan masyarakat atau kaumnya, terutama para pemilik tanah agar bersedia untuk menjual tanahnya guna menunjang kelangsungan pembangunan.

2. Pembebasan Lahan Pembangunan Tol Trans Sumatera, Sebuah Perbandingan

Pembangunan tol ruas Padang- Pekanbaru yang diperkirakan sepanjang 240 Kilometer terkendala pembebasan lahan di Kabupaten Padang Pariaman. Sebagaimana dikutip dari GoSumbang.com (Kamis 08 November 2018), pembangunan tol ruas Padang-Pekanbaru yang harusnya dimulai dari Sumatera Barat akhirnya dimulainya pembangunannya dari Riau karena ada kendala pembebasan lahan di Padang Pariaman. Masyarakat Padang Pariaman menetapkan harga tanah dengan kisaran Rp. 600 ribu hingga Rp. 2 juta per meter persegi. Namun, harga tersebut tidak disanggupi oleh tim appraisal, karena pihak pemerintah dan pengembang menilai harga tanah yang akan dijadikan lokasi pembangunan tol trans Sumatera di Padang Pariaman tidak sampai setinggi itu. Permasalahan pembebasan lahan pembangunan jalan Tol Trans Sumatera juga terjadi karena ada anggota masyarakat yang tidak setuju jika dibangun jalan tol dengan berbagai alasan.

3. Peran Tokoh Masyarakat Dalam Proses Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat

Tokoh masyarakat yang berperan dalam mengkoordinir masyarakat agar berpartisipasi dalam menyukseskan pembangunan main stadion yang dalam hal ini adalah kesediaan untuk menjual tanah atau lahannya kepada pemerintah yang kemudian pada lahan itulah akan dilaksanakannya pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat adalah mamak adat Nagari Sikabu.

Pada proses pembebasan lahan untuk pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat di Nagari Sikabu, mamak nagari terlibat sebagai agen dalam menjembatani proses sosialisasi dan negosiasi harga antarmasyarakat dengan pihak pemerintah dan pengembang hingga mencapai kata sepakat. Peran serta mamak nagari untuk membangkitkan gairah partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah di sekitar tempat tinggal mereka merupakan hal penting, terutama dalam pembebasan lahan. Mamak nagari dapat menjadi salah satu faktor yang menentukan sukses atau tidaknya proses pembebasan lahan sebuah pembangunan yang akan dijalankan di daerah mereka.

4. Potensi Lahan dan Proses Penetapan Harga Tanah Per Meter

a. Potensi Lahan

Potensi lahan dalam hal ini adalah dimana sebidang lahan di Nagari Sikabu yang dapat memberi hasil berupa produk pertanian maupun perkebunan secara optimal pertahun persatuan luasnya. Umumnya lahan potensial di Nagari Sikabu berkaitan dengan sektor pertanian dan perkebunan, dimana jenis komoditas yang dihasilkan adalah jagung, buah naga, padi, karet, dan pisang, sehingga lahan ini dinilai mempunyai kemampuan sebagai lahan produktif. Selain memiliki potensi untuk menghasilkan atau memproduksi hasil pertanian dan perkebunan, lahan di Nagari Sikabu juga memiliki potensi untuk dijadikan sebagai lahan pembangunan infrastruktur. Kondisi tanah yang padat menunjang potensi lahan di Nagari Sikabu untuk hal pembangunan dan pemukiman. Lahan yang dijadikan kawasan pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat merupakan lahan produktif pertanian dan perkebunan. Dimana lahan tersebut merupakan lahan perkebunan getah karet dan sawah.

b. Kesepakatan Harga Ganti Rugi Lahan

Tokoh masyarakat meyakinkan masyarakat pemilik tanah bahwa ada undang-undang yang menjamin keamanan hak mereka atas tanah yang akan dilepas untuk proyek pembangunan. Penjelasan yang diberikan oleh tokoh masyarakat terkait aturan pembebasan tanah pun diterima dan dapat dipahami oleh masyarakat sehingga tidak ada kendala dalam proses penetapan harga tanah, dan masyarakat menyepakati harga yang ditetapkan bersama dengan pemerintah beserta timnya, yakni Rp. 30.000 per meter persegi.

c. Pengambilan Ganti Rugi

Dana ganti rugi lahan masyarakat yang dipakai untuk pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat diambil sendiri oleh masyarakat atau kaum pemilik tanah. Pada awalnya masyarakat diminta untuk membuka tabungan atau rekening bank, sedangkan bagi yang telah memiliki rekening atau salah satu anggota kaum telah memiliki rekening, maka rekeningnya tersebut lah yang dijadikan sebagai alat pengambilan dana ganti rugi lahan.

5. Modal Sosial dalam Partisipasi Masyarakat pada Proses Pembebasan Lahan

a. Kepercayaan

Langkah awal yang diambil oleh niniak mamak Nagari Sikabu untuk menumbuhkan gairah partisipasi masyarakat dalam proses pembebasan lahan pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat adalah dengan membangun kepercayaan masyarakat terhadap tokoh masyarakat yang dalam hal ini adalah niniak mamak Nagari Sikabu. Dalam membangun kepercayaan masyarakat Sikabu, niniak mamak Nagari Sikabu mengedepankan kejujuran dan keterbukaan atau transparan terkait masalah apapun yang terjadi di Nagari Sikabu. Kejujuran seorang pemimpin di dalam masyarakat sangatlah penting untuk dapat menciptakan kepercayaan masyarakat hingga akhirnya juga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang sedang dijalankan di Nagari Sikabu. Kepercayaan antara masyarakat dengan niniak mamak Nagari Sikabu telah dibangun sejak lama dan terbukti dapat menunjang partisipasi masyarakat dalam

proses pra konstruksi pembebasan lahan pembangunan Stadio Utama Sumatera Barat, dimana tanpa ada kendala sedikitpun, kelompok masyarakat pemilik tanah bisa berpartisipasi langsung dalam pembangunan dengan melepas lahan atau tanah milik mereka untuk dijadikan tempat pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat.

b. Pengalaman Bersama Yang Teruji Waktu

Di Nagari Sikabu terdapat nilai kepercayaan yang telah terbentuk sejak lama di dalam masyarakat itu sendiri. Kepercayaan ini terjadi karena adanya interaksi dan hubungan baik antara sesama masyarakat, masyarakat dengan tokoh masyarakat yang dalam hal ini adalah tungku tigo sajaragan, dan masyarakat dengan pihak pemerintah nagari atau desa. Pada proses pembebasan lahan Stadion Utama Sumatera Barat di Nagari Sikabu terdapat hubungan sosial yang baik antara masyarakat dengan tokoh masyarakat dan pemerintah nagari. Secara umum hubungan ini dinilai menguntungkan, tidak hanya bagi salah satu kelompok maupun individu, namun memberi keuntungan dan dampak positif bagi seluruh anggota masyarakat Nagari Sikabu. Hal ini karena besarnya harapan masyarakat terhadap pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat, pembangunan ini dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor ekonomi dan pariwisata, dimana menurut masyarakat Sikabu bahwa apabila terjadi pembangunan di suatu daerah, maka akan terciptanya lapangan kerja yang dapat menyerap angkatan kerja lokal yang belum memiliki pekerjaan.

c. Jaringan

Pihak yang terlibat dalam proses pembebasan lahan untuk pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat di antaranya adalah masyarakat Nagari Sikabu, tokoh masyarakat, pemerintah Nagari Sikabu, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Semua unsur yang terlibat dalam proses pembebasan lahan Stadion Utama Sumatera Barat akhirnya membentuk jaringan dua an gandaberlapis

d. Norma

Pada proses pembebasan lahan Stadion Utama Sumatera Barat di Nagari Sikabu terdapat norma yang mengatur hubungan antar masyarakat dengan pihak tokoh masyarakat. Norma ini disebut dengan *adaik salingka nagari*, yang berarti aturan adat yang berlaku di masing-masing nagari. Masyarakat Sikabu masih mempertahankan keutuhan adat Minangkabau dalam keberlanjutan hidup bermasyarakat, sebagaimana dalam pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, maupun pembuatan program kerja nagari yang selalu dibahas, dirundingkan, dan didiskusikan dengan tokoh masyarakat yang dalam hal ini adalah Tungku Tigo Sajaragan.

e. Pemanfaatan Kearifan Lokal (*Local Wisdom*)

Kearifan lokal atau *local wisdom* menjadi kunci utama bagi niniak mamak Nagari Sikabu dalam meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah di Nagari Sikabu kecamatan Lubuk Alung. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal (*local wisdom*) biasanya diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Sebagaimana tentang peran dan tanggung jawab mamak terhadap kemenakan, tentang bagaimana perwujudan norma "*adaik salingka*

nagari” mengontrol hubungan bermasyarakat di Nagari Sikabu.

D. KESIMPULAN

Partisipasi masyarakat Nagari Sikabu, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman dalam proses pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur atau pembangunan sarana publik yang dalam hal ini adalah Stadion Utama Sumatera Barat sudah berjalan sesuai dengan modal sosial yang dimilikinya. Modal sosial yang mendukung berjalannya partisipasi meliputi pertama kepercayaan, yang ditemukan adalah adanya ikatan persukuan adat antar kaum masyarakat pemilik tanah, kedua karena pengalaman bersama dalam memecahkan masalah, ketiga karena peran tokoh masyarakat yang dalam hal ini adalah mamak adat yang bergelar Datuak, keempat karena kepastian harga ganti rugi yang tidak merugikan masyarakat maupun pemerintah, kelima karena adanya jaminan kejujuran dan keterbukaan dari pihak terkait termasuk juga tokoh masyarakat yang akan menjaga hak masyarakat Sikabu dan tidak mengizinkan adanya penambahan lahan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan pribadinya. Jaringan dapat menciptakan kepercayaan antar tokoh yang terlibat. Norma yang ditemukan pada masyarakat Sikabu adalah adat salingka nagari dan fungsi tungku tigo sajarangan yang dapat memainkan perannya dengan baik.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh informan di Nagari Sikabu, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat yang telah bersedia mengalokasikan waktunya selama proses penelitian. Penulis juga mengucapkan ribuan terimakasih kepada para dosen pembimbing yang telah mengarahkan dan menjadi mentor selama pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adi, Isbandi Rukminto. 2007. *Perencanaan partisipatoris berbasis aset komunitas: dari pemikiran menuju penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Afrizal, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif : Suatu Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta : PT. Raja Grifindo Persada.
- Creswell, John W, 1998. *Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among Five Traditions*. California: Sage Publication.
- Damsar, 2005. *Sosiologi Pasar*. Padang: Laboratorium Sosiologi FISIP Unand.
- Deddy T. Tikson. 2005. *Indikator-indikator Pembangunan Ekonomi*. <http://ecozon.html>. Diakses pada: Sabtu, 21 Juli 2018
- Fukuyama, Francis. 1999. *Social Capital and Civil Society*. The Institute of Public Policy, George Mason University.
- Hetifah, Sj. Sumarto. 2009. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance. 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kartono, Kartini. 1994. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: CV. Rajawali.

- Keith, Davis. 1962. *Human Relations at Work*. New York, San Francisco, Toronto, London.
- Lawang, Robert M.Z, 2004. *Kapital Sosial Dalam Perspektif Sosiologi Suatu Pengantar*. Depok: FISIP UI Press.
- Moleong, J, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Muhadjir, Noeng. 1990. *Metodologi penelitian kualitatif, Telaah positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, Realisme Metaphisik*. Yogyakarta: Rake Sarasin
- Mulyana, Deddy. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif "Paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya"*. Bandung : PT RemajaRosdakarya
- Navis, A.A. 1984. *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafitipers.
- Sadono, Sukirno, 1995. *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, Edisi kedua, Jakarta, Penerbit : PT. Karya Grafindo Persada
- Siagian, 1994. *Pembangunan Infrastruktur Seminar Pembangunan Konsep dan Implikasi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Spradley, James P. 1997. *Metode Etnografi*, terjemahan. Yogyakarta: TiaraWacana
- Sugiyah. 2001. *Klasifikasi Partisipasi*. Jakarta: Grasindo
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widya Sarana.
- Suryono. Agus. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. Malang: UM-Press
- Taylor dan Bogdan. 1984. *Bentuk Penelitian Kualitatif Teori Dalam Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Mizan Pustaka.

Skripsi, Tesis:

- Albartina Mutaalimah. 2017. *Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman di Kelurahan Karangwaru [skripsi]*. Yogyakarta (ID): Universitas Gadjah Mada.
- Ignasius Welerubun. 2017. *In Search Of Partisipasi Warga Lokal Dalam Pembangunan, Studi Di Boven- Digoel, Provinsi Papua [disertasi]*. Yogyakarta (ID): Universitas Gadjah Mada.
- Sitti Nurfatimah Rahma. 2016. *Perencanaan Partisipatif Dalam Proses Pembangunan Di Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa [skripsi]*. Makassar (ID): Universitas Hasanuddin.

Jurnal Online:

- Bappenas, 2001. *Konsep Strategi Dan Pelaksanaan Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D)*. Jakarta: Sekretaris Perencanaan Dan Evaluasi Pengembangan Prasarana Perdesaan(P2D).
- Manolang, Erich S. P. 2013. *Peran Tokoh Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Suatu Studi di Desa Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe)*. Vol. 5 (2013).
- Moorman, Christin, Gerald Zaltman and Rohit Deshpande. 1993. *Factors Affecting Trust in Market Research Relationship*. Jurnal Marketing Research, Vol. 57 (January, 1993).

Dokumen

- Data Base Nagari Sikabu, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman tahun 2017

Internet

- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180304110407-85-280286/perkembangan-proyek-35000-mw-baru-capai-1362-mw>, *Diakses* tanggal 2 Desember 2018
- <http://news.metrotvnews.com/read/2018/06/03/883250/tol-padang-pariaman-pekanbaru-ditunda-karena-pembebasan-lahan>, *Diakses* tanggal 20 Desember 2018
- <http://pusatkrisis.kemendes.go.id/mengapa-sumatera-barat-rawan-gempa-bumi>, *Diakses* tanggal 1 Februari 2019
- <http://m.bisnis.com/kabar24/read/20170418/78/646188/ini-pemicu.html>, *Diakses* tanggal 2 Februari 201
- <http://www.contohnaskahdrama.com/2017/10/pengertian-pembebasan-lahan-dan.html>, *Diakses* tanggal 24 Desember 2018
- <http://lampung.tribunnews.com/2017/10/24/ganti-rugi-pembebasan-lahan-tol-trans-sumatera-bermasalah-ini-tanggapan-ppk>, *Diakses* tanggal 2 Desember 2018
- <https://www.gosumbar.com/berita/baca/2018/11/08/terkendala-pembebasan-lahan-pembangunan-tol-padang-pekanbaru-akhirnya-dimulai-dari-riau>,
- <http://www.cendananews.com/2019/01/pengerjaan-stadion-terbesar-di-sumbar-terus-dikebut.html>, *Diakses* tanggal 28 Januari 2019